



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, hal terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara adalah merupakan dokumen wajib yang harus dilaporkan oleh masing-masing SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, pada bab II Penetapan Kinerja Pasal 3 dinyatakan bahwa dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan. Hal ini jika dipahami oleh seluruh pelaku pembangunan terutama para pimpinan SKPD, maka akan ada kesungguhan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Lkj-ip ini juga bisa menjadi ukuran oleh pimpinan daerah dalam menilai seberapa besar usaha pimpinan SKPD dalam melaksanakan kinerjanya pada masing-masing SKPD dan juga bisa menjadi ukuran pimpinan daerah dalam melaksanakan mutasi pimpinan dalam lingkup pemerintah daerah. Dokumen Lkj-ip juga menjadi sarana bagi pimpinan daerah untuk melakukan evaluasi secara bertahap dan menyeluruh terhadap permasalahan yang dihadapi dan sekaligus akan dicarikan solusi untuk memecahkan permasalahan dimaksud. Agar terarah untuk melaporkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, maka pemerintah telah memandu seluruh pemerintah daerah tentang sistematika pelaporan minimal memuat tentang pencapaian tujuan dan sasaran SKPD, realisasi pencapaian indikator kinerja utama SKPD, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan



target kerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Panduan ini diharapkan agar penilaian terhadap realisasi kinerja SKPD dapat terukur sesuai dengan harapan dan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara periode 2021-2026 yang didalamnya telah ditetapkan target capaian indikator kinerja pemerintah daerah yang diupayakan untuk dicapai. Perlu diketahui bahwa Lkj-ip tahun 2023 adalah merupakan dokumen Lkj-ip tahun kedua dari periode kepemimpinan kepala daerah periode 2021-2024.

## 1.2 Struktur Organisasi.

Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana adalah merupakan salah satu SKPD yang keberadaannya berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi antara lain :

- a. Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian antara lain :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Perempuan membawahi 3 (tiga) seksi antara lain :
  - 1) Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di bidang ekonomi
  - 2) Seksi Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Sosial Politik Dan Hukum
  - 3) Seksi Data Dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan
- c. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dan Pemenuhan Hak Anak membawahi 3 (tiga) seksi antara lain :
  - 1) Seksi Perlindungan Anak
  - 2) Seksi Pemenuhan Hak Anak
  - 3) Seksi Data Dan Informasi Kekerasan Anak



- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana Kesejahteraan Keluarga Dan Pengendalian Penduduk membawahi 3 (tiga) seksi antara lain :
  - 1) Seksi Kesertaan ber-KB
  - 2) Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
  - 3) Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga
- e. 1) Unsur Pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 2) Unsur Pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

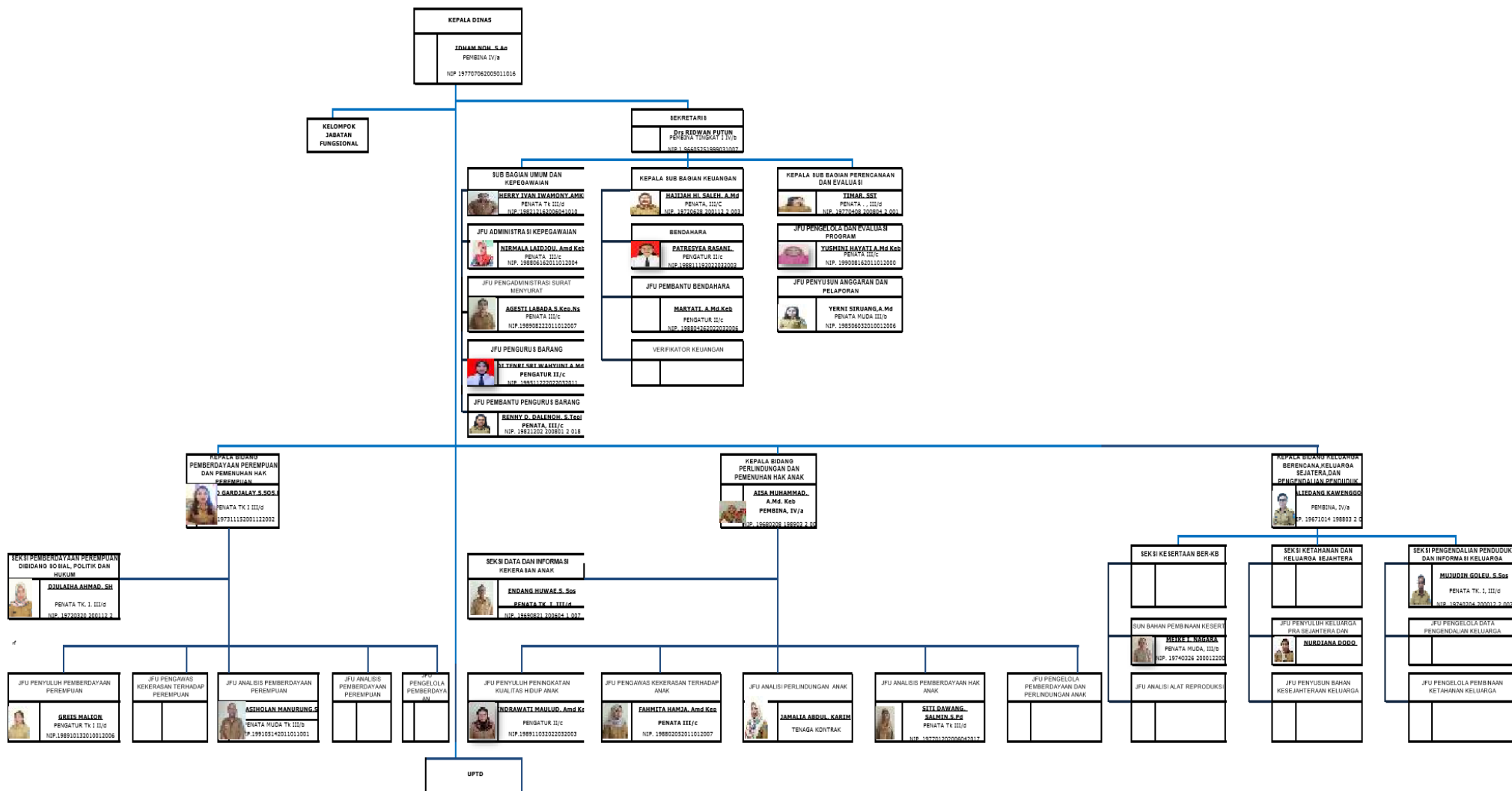
Dari struktur tersebut masing-masing seksi juga membawahi staf sesuai dengan pembagian tugasnya pada masing-masing bidang, selengkapnya struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada gambar berikut.



# DOKUMEN LKJ-IP DP3AK KAB. HALMAHERA UTARA

2024

## STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024





### 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis daerah adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
  - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
  - 2) Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas pokoknya
  - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
  - 4) Pelaksanaan tugas pokok lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### 1.4 Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

#### 1.4.1 Susunan Kepegawaian

Berdasarkan struktur organisasi yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana maka keadaan pegawai adalah sebagai berikut :

##### a) Jabatan Struktural

Para pejabat yang mengisi jabatan struktural sebanyak 10 (sepuluh) orang pejabat, mulai dari eselon II sampai dengan eselon IV antara lain :



**Tabel 1.1**  
**Kondisi Jumlah Jabatan Struktural dan Jumlah Pegawai di Dinas Pemberdayaan**  
**Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Halmahera Utara**  
**Tahun 2024**

| NO | NAMA/ NIP                                                   | PANGKAT/<br>GOLONGAN      | JABATAN                                                                                 | STATUS | KET. |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1. | IDHAM NOH,S.Ag<br>197707062005011016                        | PEMBINA IV/a              | Kepala Dinas                                                                            | PNS    |      |
| 2  | Drs RIDWAN PUTUN<br>196605251999031007                      | PEMBINA TINGKAT<br>I IV/b | Sekretaris                                                                              | PNS    |      |
| 3  | ODALIEDANG KAWENGGO, S.Ip<br>196710141988032007             | PEMBINA IV/a              | Kepala Bidang Keluarga<br>Berencana ,Keluarga<br>Sejahtera dan<br>Pengendalian Penduduk | PNS    |      |
| 4  | AISA MUHAMMAD, A.Md, Keb<br>196802081989032008              | PEMBINA IV/a              | Kepala Bidang<br>Perlindungan dan<br>Pemenuhan Hak Anak                                 | PNS    |      |
| 5  | NORTJE D. GARDJALAY. S. Sos. MSi<br>NIP. 197311152001122002 | PENATA Tkt I III/d        | Kepala Bidang<br>Pemberdayaan Perempuan<br>dan Pemenuhan Hak<br>Perempuan               | PNS    |      |
| 6  | HERRY IVAN IWAMONY,AMKL<br>198212162006041010               | PENATA Tk I III/d         | Ka. Su Bag Kepegawaian                                                                  | PNS    |      |
| 7  | TIMAR, SST<br>197704082008042001                            | 'PENATA III/d             | Ka. Sub Bag Perencanaan<br>dan Evaluasi                                                 | PNS    |      |
| 8  | HAJIJAH Hi SALEH, A.Md<br>197206282001122003                | PENATA Tk 1 III/d         | Analisis Keuangan Pusat dan<br>Daerah Ahli Muda                                         | PNS    |      |
| 9  | DJULAIHA AHMAD,SH<br>197203202001122003                     | PENATA Tk I III/d         | Penggerak Swadaya<br>Masyarakat Ahli Muda                                               | PNS    |      |
| 10 | MUJUDIN GOLEU, S.Sos<br>197308162003121011                  | PENATA Tk I III/d         | Penggerak Swadaya<br>Masyarakat Ahli Muda                                               | PNS    |      |
| 11 | ENDANG HUWAE, S.Sos<br>196909212006041007                   | PENATA Tk I III/d         | Penggerak Swadaya<br>Masyarakat Ahli Muda                                               | PNS    |      |
| 12 | SELFINA MANERY, A.Md.Keb<br>198609222008022000              | PENATA Tk I III/d         | STAF                                                                                    | PNS    |      |
| 13 | ASMIRA EGO, A.Md.Keb<br>198106092006042014                  | PENATA Tk I III/d         | STAF                                                                                    | PNS    |      |



|    |                                                           |                           |                                   |     |  |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----|--|
| 14 | SUTNA DEWI RONDA, Amd.Keb<br>198412142009032003           | PENATA Tk I III/d         | STAF                              | PNS |  |
| 15 | SITI DAWANG SALMIN, S.Pd<br>197701202006042017            | PENATA Tk I III/d         | STAF                              | PNS |  |
| 16 | AGESTI LABADA, S.Kep<br>198908222011012007                | PENATA III/c              | STAF                              | PNS |  |
| 17 | FAHMITA HAMJA, Amd, Kep<br>198805022011012007             | 'PENATA III/c             | STAF                              | PNS |  |
| 18 | YUSMINI HAYATI, A.md, Keb<br>199008162011012001           | 'PENATA III/c             | STAF                              | PNS |  |
| 19 | NIRMALA LAIDJOU, Amd. Keb<br>198806162011012004           | PENATA III/c              | STAF                              | PNS |  |
| 20 | RENNY DALENOH, S.Teol<br>198212022008012018               | PENATA III/c              | Pembantu Pengurus<br>Barang       | PNS |  |
| 21 | MEIKE I. NAGARA<br>197403262000122006                     | PENATA MUDA TK<br>I III/b | STAF                              | PNS |  |
| 22 | YERNI SIRUANG, A.Md<br>198506032010012006                 | PENATA MUDA TK<br>I III/b | STAF                              | PNS |  |
| 23 | MARHASIROLAN MANURUNG, SH<br>199105142011011001           | PENATA MUDA TK<br>I III/b | STAF                              | PNS |  |
| 24 | NURDIANA DODO, Amd, Keb<br>199212252017052002             | PENATA MUDA<br>III/a      | STAF                              | PNS |  |
| 25 | GRACE MALION<br>198910132010012006                        | PENGATUR Tk I<br>II/d     | STAF                              | PNS |  |
| 26 | MARYATI, Amd, Keb<br>198804262022032008                   | PENGATUR II/c             | Pembantu Bendahara<br>Pengeluaran | PNS |  |
| 27 | ANDI TENRI SRI WAHYUNI,<br>A.Md.Keb<br>199511222022032011 | PENGATUR II/c             | Pengurus Barang                   | PNS |  |
| 28 | PATRESYEA RASANI, A.Md, Keb<br>198811192022032003         | PENGATUR II/c             | Bendahara                         | PNS |  |
| 29 | INDRAWATI MAULUD, Amd, Keb<br>198911032022032003          | PENGATUR II/c             | Staf                              | PNS |  |



|    |                            |  |      |     |  |
|----|----------------------------|--|------|-----|--|
| 30 | JEMI B TJIE                |  | Staf | TKD |  |
| 31 | JAMALIA ABD KARIM          |  | Staf | TKD |  |
| 32 | DELSIN SIRUANG             |  | Staf | TKD |  |
| 33 | GRIVINTIA ANASTASIA LAHURA |  | Staf | TKD |  |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah sumber daya manusia yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi DP3AKB Kabupaten Halmahera utara pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- I. Jumlah Pegawai  
ASN : 29 orang  
TKD : 4 orang
- II. Berdasarkan Eselon  
Esellon II : 1 orang  
Eselon III : 4 orang  
Eselon IV : 6 orang
- III. Berdasarkan Golongan Pangkat  
Golongan IV.a : 3 orang  
Golongan III.d : 10 orang  
Golongan III.c : 5 orang  
Golongan III.b : 3 orang  
Golongan III.a : 1 orang  
Golongan II.d : 1 orang  
Golongan II.c : 4 orang
- IV. Berdasarkan kualifikasi pendidikan  
Pasca Sarjana : 1 orang  
Sarjana S1 : 11 orang  
Diploma III : 17 orang  
SLTA : 4 orang  
SMP : 1 orang



**b) Jabatan Fungsional**

Hingga dokumen Lk-jip ini dibuat, jabatan fungsional pada Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana belum terisi atau masih kosong.

**1.4.2 Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

Untuk mendukung dan menopang kinerja bagi setiap pegawai yang menempati sesuai bidang tugasnya masing-masing, seluruh pegawai dibekali dengan :

- a. Gedung kantor yang representatif untuk bekerja dan melayani masyarakat.
- b. Peralatan kantor yang memadai terdiri dari :
  - 1) Kendaraan roda empat untuk mendukung operasional dan mobile tugas kantor.
  - 2) Kendaraan roda dua untuk mendukung operasional dan mobile tugas kantor
  - 3) Meja, kursi dan lemari kerja yang memadai untuk tempat kerja. serta
  - 4) Sarana dan prasarana lainnya.

Sarana dan prasarana pada 5 (lima) tahun terakhir (2018-2024) selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :



TABEL 1.2  
Kondisi Sarana dan Prasarana Tahun 2018-2024

KARTU INVENTARIS BARANG ( KIB ) B  
PERALATAN DAN MESIN

NO. KODE LOKASI : 12.27.06.10.02.19.01.01

| No<br>. | Kode Barang |    |    |    |    | Jenis Barang/<br>Nama Barang | Nomor<br>Register | Merk/<br>Type      | Ukuran<br>/ CC | Bahan | Tahun<br>Pembelian | Nomor  |        |       |        |      | Asal-usul Cara<br>Perolehan | Harga Perolehan<br>(Rp.) | Ket |
|---------|-------------|----|----|----|----|------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------|--------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------------------------|--------------------------|-----|
|         |             |    |    |    |    |                              |                   |                    |                |       |                    | Pabrik | Rangka | Mesin | Polisi | BPKB |                             |                          |     |
| 1       | 2           |    |    |    |    | 3                            | 4                 | 5                  | 6              | 7     | 8                  | 9      | 10     | 11    | 12     | 13   | 14                          | 15                       | 16  |
| 1       | 02          | 03 | 01 | 02 | 03 | Mini Bus                     |                   | Daihatsu/L<br>uxio | –              | Besi  | 2019               | –      | –      | –     | –      | –    | Hiba                        | Rp 239.950.000           |     |
| Total   |             |    |    |    |    |                              |                   |                    |                |       |                    |        |        |       |        |      |                             | Rp 239.950.000           |     |



# DOKUMEN LKJ-IP DP3AK KAB. HALMAHERA UTARA

## 2024

### KARTU INVENTARIS BARANG ( KIB ) B

#### PERALATAN DAN MESIN

NO. KODE LOKASI : 12.27.06.10.02.20.01.01

| No<br>. | Kode Barang |    |    |    |    | Jenis Barang/<br>Nama Barang | Nomor<br>Register | Merk/<br>Type              | Ukuran<br>/ CC | Bahan | Tahun<br>Pembelian | Nomor  |                           |                       |               |      | Asal-usul Cara<br>Perolehan | Harga Perolehan<br>(Rp.) | Ket |
|---------|-------------|----|----|----|----|------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------|--------------------|--------|---------------------------|-----------------------|---------------|------|-----------------------------|--------------------------|-----|
|         |             |    |    |    |    |                              |                   |                            |                |       |                    | Pabrik | Rangka                    | Mesin                 | Polisi        | BPKB |                             |                          |     |
| 1       | 2           |    |    |    |    | 3                            | 4                 | 5                          | 6              | 7     | 8                  | 9      | 10                        | 11                    | 12            | 13   | 14                          | 15                       | 16  |
| 1       | 02          | 03 | 01 | 05 | 01 | Sepeda Motor                 | 01                | Honda/ALF<br>02N37ML<br>AT |                | Besi  | 2020               |        | MH1JM<br>5110JK1<br>69917 | JM51E-<br>116962<br>8 | B 3199<br>PIQ |      | Hiba                        | Rp 12.507.600            |     |
| Total   |             |    |    |    |    |                              |                   |                            |                |       |                    |        |                           |                       |               |      |                             | Rp 12.507.600            |     |



# DOKUMEN LKJ-IP DP3AK KAB. HALMAHERA UTARA

## 2024

### KARTU INVENTARIS BARANG ( KIB ) B

#### PERALATAN DAN MESIN

NO. KODE LOKASI : 12. 27. 06. 50.2022. 00

| No. | Kode Barang |   |   |    |    |    |     |                                          | Jenis Barang/<br>Nama Barang | Nomor<br>Register | Merk/<br>Type | Ukuran<br>/ CC | Bahan | Tahun<br>Pembelian     | Nomor  |        |       |        |           | Asal-usul<br>Cara<br>Perolehan | Harga<br>(Rp.) | Ket |
|-----|-------------|---|---|----|----|----|-----|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------|------------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------------------------------|----------------|-----|
|     |             |   |   |    |    |    |     |                                          |                              |                   |               |                |       |                        | Pabrik | Rangka | Mesin | Polisi | BPKB      |                                |                |     |
| 1   | 2           |   |   |    |    |    |     |                                          | 3                            | 4                 | 5             | 6              | 7     | 8                      | 9      | 10     | 11    | 12     | 13        | 14                             | 15             | 16  |
| 1   | 1           | 3 | 2 | 10 | 01 | 02 | 002 | Lap top                                  | 000008                       | Acer              | -             | Campur         | 2022  | NXA23SN006234145DD3400 | -      | -      | -     | -      | Pembelian | 9.552.000                      |                |     |
| 2   | 1           | 3 | 2 | 10 | 01 | 02 | 002 | Lap top                                  | 000009                       | Acer              | -             | Campur         | 2022  | NXA23SN00623413DCD3400 | -      | -      | -     | -      | Pembelian | 9.552.000                      |                |     |
| 3   | 1           | 3 | 2 | 10 | 01 | 02 | 002 | Lap top                                  | 000010                       | Acer              | -             | Campur         | 2022  | NXA23SN0062341671C3400 | -      | -      | -     | -      | Pembelian | 9.552.000                      |                |     |
| 4   | 1           | 3 | 2 | 10 | 01 | 02 | 002 | Lap top                                  | 000011                       | Acer              | -             | Campur         | 2022  | NXA23SN006234167243400 | -      | -      | -     | -      | Pembelian | 9.552.000                      |                |     |
| 5   | 1           | 3 | 2 | 10 | 02 | 03 | 003 | Printer (Peralatan<br>Personal Komputer) | 000010                       | Canon             | -             | Campur         | 2022  | NFR99087               | -      | -      | -     | -      | Pembelian | 1.500.000                      |                |     |
| 6   | 1           | 3 | 2 | 10 | 02 | 03 | 003 | Printer (Peralatan<br>Personal Komputer) | 000011                       | Canon             | -             | Campur         | 2022  | NFR99087               | -      | -      | -     | -      | Pembelian | 1.500.000                      |                |     |



# DOKUMEN LKJ-IP DP3AK KAB. HALMAHERA UTARA

2024

|       |   |   |   |    |    |    |     |                 |                         |   |   |                |      |   |   |   |   |   |           |            |  |
|-------|---|---|---|----|----|----|-----|-----------------|-------------------------|---|---|----------------|------|---|---|---|---|---|-----------|------------|--|
| 7     | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 032 | Kursi Putar     | 000003<br>s/d<br>000010 | - | - | Besi/Sp<br>ons | 2022 | - | - | - | - | - | Pembelian | 12.056.000 |  |
| 8     | 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | 01 | 002 | Meja Kerja Kayu | 000001<br>s/d<br>000008 | - | - | Kayu           | 2022 | - | - | - | - | - | Pembelian | 20.000.000 |  |
| 9     | 1 | 3 | 2 | 05 | 01 | 04 | 002 | Lemari Kayu     | 000010                  | - | - | Kayu           | 2022 | - | - | - | - | - | Pembelian | 3.515.000  |  |
| TOTAL |   |   |   |    |    |    |     |                 |                         |   |   |                |      |   |   |   |   |   |           | 76.779.000 |  |



# DOKUMEN LKJ-IP DP3AK KAB. HALMAHERA UTARA

## 2024

### KARTU INVENTARIS BARANG ( KIB ) C

#### GEDUNG DAN BANGUNAN

NO. KODE LOKASI : 12.27.06.10.02.18.01.00

| No.   | Jenis Barang/<br>Nama Barang          | Nomor              |          | Kondisi<br>Bangunan<br>(B, KB, RB) | Konstruksi Bangunan  |                     | Luas<br>Lantai<br>(M2) | Letak/ Lokasi<br>Alamat               | Dokumen Gedung |                             | Luas<br>(M2)      | Status<br>Tanah | Nom<br>or<br>Kode<br>Tana<br>h | Asal-Usul | Harga Perolehan<br>(Rp.) | Ket |
|-------|---------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-----|
|       |                                       | Kode Barang        | Register |                                    | Bertingkat/Ti<br>dak | Beton<br>/Tida<br>k |                        |                                       | Tanggal        | Nomor                       |                   |                 |                                |           |                          |     |
| 1     | 2                                     | 3                  | 4        | 5                                  | 6                    | 7                   | 8                      | 9                                     | 10             | 11                          | 12                | 13              | 14                             | 15        | 16                       | 17  |
| 1     | Bangunan<br>Gedung Kantor<br>Permanen | 03.11.01.01.<br>01 | 0001     | Baik                               | Tidak                | Beton               | 50 m <sup>2</sup>      | Desa Soakonora<br>Kec. Galela Selatan | 04-Apr-18      | 476/100/PPK/DP3<br>AKB/2018 | 50 m <sup>2</sup> | Hiba            |                                | Pembelian | Rp<br>310.897.667        | -   |
| 2     | Bangunan<br>Gedung Kantor<br>Permanen | 03.11.01.01.<br>01 | 0002     | Baik                               | Tidak                | Beton               | 50 m <sup>2</sup>      | Desa Yaro Kec.<br>Tobelo Timur        | 04-Apr-18      | 476/100/PPK/DP3<br>AKB/2018 | 50 m <sup>2</sup> | Hiba            | -                              | Pembelian | Rp<br>310.897.667        | -   |
| 3     | Bangunan<br>Gedung Kantor<br>Permanen | 03.11.01.01.<br>01 | 0003     | Baik                               | Tidak                | Beton               | 50 m <sup>2</sup>      | Desa Daru Kec.<br>Kao Utara           | 04-Apr-18      | 476/100/PPK/DP3<br>AKB/2018 | 50 m <sup>2</sup> | Hiba            | -                              | Pembelian | Rp<br>310.897.666        | -   |
| TOTAL |                                       |                    |          |                                    |                      |                     |                        |                                       |                |                             |                   |                 |                                |           | Rp<br>932.693.000        |     |



KARTU INVENTARIS BARANG ( KIB ) C

GEDUNG DAN BANGUNAN

NO. KODE LOKASI : 12.27.06.10.02.19.01.00

| No. | Jenis Barang/<br>Nama Barang          | Nomor              |          | Kondisi<br>Bangunan<br>(B, KB, RB) | Konstruksi Bangunan  |                     | Luas<br>Lantai<br>(M2) | Letak/ Lokasi<br>Alamat          | Dokumen Gedung |                             | Luas<br>(M2)      | Status<br>Tanah | Nom<br>or<br>Kode<br>Tana<br>h | Asal-Usul | Harga Perolehan<br>(Rp.) | Ket |
|-----|---------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-----|
|     |                                       | Kode Barang        | Register |                                    | Bertingkat/Ti<br>dak | Beton<br>/Tida<br>k |                        |                                  | Tanggal        | Nomor                       |                   |                 |                                |           |                          |     |
| 1   | 2                                     | 3                  | 4        | 5                                  | 6                    | 7                   | 8                      | 9                                | 10             | 11                          | 12                | 13              | 14                             | 15        | 16                       | 17  |
| 1   | Bangunan<br>Gedung Kantor<br>Permanen | 03.11.01.01.<br>01 | 0001     | Baik                               | Tidak                | Beton               | 50 m <sup>2</sup>      | Desa Dorume Kec.<br>Loloda Utara | 27-Mei-19      | 476/184/PPK/DP3<br>AKB/2019 | 50 m <sup>2</sup> | Hiba            |                                | Pembelian | Rp<br>403.000.000        | -   |
| 2   | Bangunan<br>Gedung Kantor<br>Permanen | 03.11.01.01.<br>01 | 0002     | Baik                               | Tidak                | Beton               | 50 m <sup>2</sup>      | Desa Tolabit Kec.<br>Kao Barat   | 27-Mei-19      | 476/186/PPK/DP3<br>AKB/2019 | 50 m <sup>2</sup> | Hiba            | -                              | Pembelian | Rp<br>391.000.000        | -   |
| 3   | Bangunan<br>Gedung Kantor<br>Permanen | 03.11.01.01.<br>01 | 0003     | Baik                               | Tidak                | Beton               | 50 m <sup>2</sup>      | Desa Dum-Dum<br>Kec. Kao Teluk   | 27-Mei-19      | 476/188/PPK/DP3<br>AKB/2019 | 50 m <sup>2</sup> | Hiba            | -                              | Pembelian | Rp<br>396.000.000        | -   |



# DOKUMEN LKJ-IP DP3AK KAB. HALMAHERA UTARA

## 2024

TOTAL

Rp  
1.190.000.000

### KARTU INVENTARIS BARANG ( KIB ) C

#### GEDUNG DAN BANGUNAN

NO. KODE LOKASI : 12.27.06.10.02.20.01.00

| No. | Jenis Barang/<br>Nama Barang          | Nomor              |              | Kondisi<br>Bangunan<br>(B, KB, RB) | Konstruksi Bangunan  |                 | Luas Lantai<br>(M2) | Letak/ Lokasi<br>Alamat               | Dokumen Gedung |                                                 | Luas<br>(M2)      | Status<br>Tanah | Nomor<br>Kode<br>Tanah | Asal-Usul | Harga             | Ket |
|-----|---------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|-----|
|     |                                       | Kode<br>Barang     | Regis<br>ter |                                    | Bertingkat<br>/Tidak | Beton/<br>Tidak |                     |                                       | Tanggal        | Nomor                                           |                   |                 |                        |           |                   |     |
| 1   | 2                                     | 3                  | 4            | 5                                  | 6                    | 7               | 8                   | 9                                     | 10             | 11                                              | 12                | 13              | 14                     | 15        | 16                | 17  |
| 1   | Bangunan<br>Gedung Kantor<br>Permanen | 03.11.01.0<br>1.01 | 0001         | Baik                               | Tidak                | Beton           | 50 m <sup>2</sup>   | Desa Salimuli<br>Kec. Galela<br>Utara | 26-Mei-<br>20  | 04.b/DOK-UPTD<br>GALUT/PPK/DP3AKB<br>HALUT/2020 | 50 m <sup>2</sup> | Hiba            |                        | Pembelian | Rp<br>388.713.698 | -   |
| 2   | Bangunan<br>Gedung Kantor<br>Permanen | 03.11.01.0<br>1.01 | 0002         | Baik                               | Tidak                | Beton           | 50 m <sup>2</sup>   | Desa Gamsungi<br>Kec. Tobelo          | 27-Mei-<br>20  | 05.b/DOK-UPTD<br>TBLO/PPK/DP3AKB<br>HALUT/2020  | 50 m <sup>2</sup> | Hiba            | -                      | Pembelian | Rp<br>345.709.457 | -   |



# DOKUMEN LKJ-IP DP3AK KAB. HALMAHERA UTARA

## 2024

|       |                                 |                |      |      |       |       |                   |                                 |           |                                           |                   |      |   |           |                |   |
|-------|---------------------------------|----------------|------|------|-------|-------|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------|------|---|-----------|----------------|---|
| 3     | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.11.01.01.01 | 0003 | Baik | Tidak | Beton | 50 m <sup>2</sup> | Desa Dama Kec. Loloda Kepulauan | 27-Mei-20 | 05.b/DOK-UPTD LOKEP/PPK/DP3AKB HALUT/2020 | 50 m <sup>2</sup> | Hiba | — | Pembelian | Rp 447.718.514 | - |
| TOTAL |                                 |                |      |      |       |       |                   |                                 |           |                                           |                   |      |   |           | 1.182.141.669  |   |

### KARTU INVENTARIS BARANG ( KIB ) C

#### GEDUNG DAN BANGUNAN

| No. | Jenis Barang/<br>Nama Barang                        | Nomor       |    |    |    |    | Kondisi<br>Bangunan<br>(B, KB, RB) | Konstruksi Bangunan |                      | Luas<br>Lantai<br>(M2) | Letak/ Lokasi Alamat | Dokumen Gedung             |           | Luas<br>(M2)                                       | Status<br>Tanah | Nomor<br>Kode<br>Tanah | Asal-<br>Usul | Harga | Ket.        |    |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|-------|-------------|----|
|     |                                                     | Kode Barang |    |    |    |    |                                    | Register            | Bertingkat<br>/Tidak |                        |                      | Beton<br>/Tidak            |           |                                                    |                 |                        |               |       |             |    |
| 1   | 2                                                   | 3           |    |    |    |    | 4                                  | 5                   | 6                    | 7                      | 8                    | 9                          | 10        | 11                                                 | 12              | 13                     | 14            | 15    | 16          | 17 |
| 1   | Program Keluarga Berencana /Rehap Gedung Obat       | 03          | 11 | 01 | 01 | 01 |                                    | B                   |                      | Beton                  |                      | Jalan Kawasan Pemerintahan | 29-Mar-21 | 03.b/SP/DOK-PUMBUPTD/PPK/DP3AKB-HALUT/III/2021     |                 |                        |               | APBN  | 360.897.485 |    |
| 2   | Program Keluarga Berencana /Pembangunan Gedung UPTD | 03          | 11 | 01 | 01 | 01 |                                    | B                   |                      | Beton                  |                      | Desa soa-sio               | 29-Mar-21 | 02.b/SP/DOK-REHABGDNOBAT/PPK/DP3AKB-HALUT/III/2021 |                 |                        |               | APBN  | 234.750.845 |    |



TOTAL

595.648.330

PENGADAAN SARANA PRASARAN DP3AKB

| N<br>O | JENIS KEGIATAN                                      |      |      |      |      |      |                     | Harga (2018) |             | Harga (2019) |               | Harga (2020)    |               | Harga (2021) |             | Harga (2022)    |             | ket |
|--------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-----|
|        |                                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Jumlah<br>Pengadaan | Harga Satuan | Jumlah      | Harga Satuan | Jumlah        | Harga<br>Satuan | Jumlah        | Harga Satuan | Jumlah      | Harga<br>Satuan | Jumlah      |     |
| 1      | 2                                                   | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8                   | 9            | 10          | 11           | 12            | 13              | 14            | 15           | 16          | 17              | 18          | 19  |
| 1      | Sarana Prasarana<br>Pelayanan KB                    |      |      |      |      |      |                     |              |             |              |               |                 |               |              |             |                 |             |     |
|        | IUD Kit                                             |      |      |      | 23   |      | 23                  |              |             |              |               |                 |               | 10.450.550   | 240.362.650 |                 |             |     |
|        | Implan Kit                                          |      |      |      | 39   |      | 39                  |              |             |              |               |                 |               | 5.665.550    | 220.956.450 |                 |             |     |
| 2      | Pembangunan Balai<br>Penyuluhan KB Tk.<br>Kecamatan | 3    | 3    | 3    | 1    |      | 10                  | 320.500.000  | 961.500.000 | 399.161.000  | 1.197.483.000 | 403.156.566     | 1.209.469.698 | 360.897.485  | 360.897.485 |                 |             |     |
| 3      | Rehabilitasi Gudang Alat<br>dan Obat Kontrasepsi    |      |      |      | 1    |      | 1                   |              |             |              |               |                 |               | 234.750.835  | 234.750.835 |                 |             |     |
| 4      | Sarana Prasarana<br>Penurunan Stunting              |      |      |      |      |      |                     |              |             |              |               |                 |               |              |             |                 |             |     |
|        | Genre Kit                                           | 5    | 6    |      |      |      | 11                  | 34.750.000   | 173.750.000 | 34.750.000   | 208.500.000   |                 |               |              |             |                 |             |     |
|        | BKB Kit                                             |      |      | 24   |      | 12   | 36                  |              |             |              |               | 7.000.000       | 168.000.000   |              |             | 14.646.450      | 175.757.400 |     |
|        | BKL Kit                                             |      |      | 18   |      |      | 18                  |              |             |              |               | 7.000.000       | 126.000.000   |              |             |                 |             |     |
|        | Kit Siap Nikah                                      |      |      |      |      | 15   | 15                  |              |             |              |               |                 |               |              |             | 8.580.300       | 128.704.500 |     |



DOKUMEN LKJ-IP DP3AK KAB. HALMAHERA  
UTARA

2024

|   |                                                            |   |   |    |    |    |     |  |               |  |               |  |               |  |               |            |             |  |
|---|------------------------------------------------------------|---|---|----|----|----|-----|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|------------|-------------|--|
| 5 | Sarana Prasarana Transportasi KB (RODA DUA)                |   |   |    |    | 8  | 8   |  |               |  |               |  |               |  |               | 29.350.000 | 234.800.000 |  |
| 6 | Sarana Prasarana Pendataan di Balai KB (PERSONAL COMPUTER) |   |   |    |    | 9  | 9   |  |               |  |               |  |               |  |               | 24.931.710 | 224.385.390 |  |
|   | TOTAL                                                      | 8 | 9 | 45 | 64 | 44 | 170 |  | 1.135.250.000 |  | 1.405.983.000 |  | 1.503.465.698 |  | 1.056.967.420 |            | 763.647.290 |  |



Dari hasil rekapan hasil sensus aset yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dapat terlihat dengan jelas bahwa sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kinerja SKPD terus ditingkatkan dari waktu ke waktu dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dalam kantor.

### 1.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis adalah mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang mempengaruhi permasalahan pelayanan selama ini. Penentuan isu-isu strategis yang akan dikemukakan pada dokumen ini telah disesuaikan dengan gambaran pelayanan pada Kementerian PPPA RI, Dinas P3AKB Provinsi Maluku Utara dan juga gambaran pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara. Sehingga perlu disesuaikan pula dengan sasaran jangka menengah pada renstra kementerian/lembaga, sasaran jangka menengah dan renstra PPPA dan KB Provinsi Maluku Utara dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara dan telah dikaji implikasi RT/RW bagi pelayanan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan telah dikaji pula implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana di lapangan.

Adapun isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang akan dilaksanakan melalui Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara selama kurun waktu 2021-2026 antara lain :

- a) Belum adanya kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan Responsif Gender (PPRG);
- b) Masih kurangnya Komitmen dukungan dana untuk menunjang pelayanan pedampingan Kekerasan
- c) Belum optimalnya perwujudan Kabupaten Layak Anak (KLA), dikarenakan belum adanya kerangka kerja pemenuhan hak anak pemerintah bersama dengan masyarakat dengan dunia usaha;
- d) Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi.



## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKJ-IP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### **Bab I – Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana kantor, serta sistematika penyusunan lkj-ip;

### **Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Menjelaskan secara ringkas rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dan RPJMD 2021-2026, dan penetapan kinerja Tahun 2023.

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023.

### **Bab IV – Penutup**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi/saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



## BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Untuk memulai sebuah rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, maka langkah tersebut tidak terlepas dari penetapan rencana strategis antara lain :

#### 1. Visi dan Misi Kepala Daerah.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah:

***“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HALMAHERA UTARA MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN INOVASI DAN INVESTASI DALAM KEBERSAMAAN YANG BERKEADILAN”***

Makna yang terkandung dalam Visi ini adalah:

- a. **Kesejahteraan Masyarakat**, artinya kesejahteraan dapat merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, yang ukurannya dapat berbeda bagi perspektif setiap individu atau keluarga, maupun komunitas. Akan tetapi pada prinsipnya konteks kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.
- b. **Pembangunan Berkelanjutan**, proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang



mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

- c. **Inovasi**, artinya pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun inovasi namun secara umum inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model pengelolaan paling optimal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.
- d. **Investasi**, artinya Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan (sustainability).

Visi tersebut juga telah dijabarkan kedalam beberapa misi sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026 antara lain :

- ❖ **Misi Pertama, Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah.**

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan, melalui pemanfaatan aksesibilitas di bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya dalam menyiapkan generasi bangsa / generasi berencana (GENDRE) yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air sehingga mampu menghadapi tantangan dan dapat beradaptasi dengan



dinamika perubahan serta perkembangan kemajuan jaman. Meningkatkan peranserta keluarga dalam peningkatan kualitas hidup keluarga kecil bahagia melalui sarana pendidikan, Peningkatan prasarana kesehatan termasuk Puskesmas Ramah Anak, Rumah sakit Ramah Anak, Sekolah ramah Anak. Dengan demikian maka kesesuaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah telah diformulasikan selama lima tahun kedepan, sehingga Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana akan menjadi panduan dalam menyusun rencana program dan kegiatan dari Tahun 2021-2026

## 2. Tujuan

*Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang terkendali dan Meningkatkan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak*

## 3. Sasaran

Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara ditetapkan empat sasaran antara lain :

1. Menurunnya Angka kelahiran
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak
3. Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

## 4. Indikator Kinerja

Sesuai dengan perencanaan yang telah dicanangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra-DP3AKB) maupun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2016-2021), indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana yang ingin dicapai ditetapkan sebagai berikut :

### a. Indikator Tujuan

- Total angka kelahiran (TFR)
- Indeks Pembangunan Gender



- Nilai Kabupaten Layak Anak
- Penurunan Total angka kelahiran (TFR) (Basis poin)
- Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan
- Persentase jumlah Indikator KLA yang telah terpenuhi
- Rasio KDRT
- Nilai Sakip Perangkat Daerah

## **5. Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

### **5.1.Strategi**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Peningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
2. Memperkuat dan mendorong implementasi PPRG oleh melalui pembuatan peraturan daerah , Peraturan Bupati tentang PPRG, Perlindungan Perempuan dan pemenuhan Hak Anak
3. Peningkatan anggaran seta kerjasama lintas sektor di kabupaten/kota untuk mewujudkan kabupaten layak anak

### **5.2.Arah Kebijakan**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan yang ditempuh sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai kearifan budaya local
2. Meningkatnya pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
3. Meningkatnya ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk;



4. Meningkatnya pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah;
5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
6. Meningkatnya pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
7. Meningkatkan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan, melalui: koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, serta advokasi kebijakan, penyediaan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan;
8. Meningkatkan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak serta penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus
9. Meningkatkan Kerjasama lintas sektor dalam peningkatkan indikator yang diperlukan dalam pemenuhan kabupaten layak anak

#### **Program dan Kegiatan.**

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra maupun dalam dokumen RPJMD yaitu:



Tabel 2.1 Program dan Kegiatan DP3AKB Tahun 2024

| NO | Program/Kegiatan                                                 | Lokasi | Anggaran      | sumber dana |           |          | SKPD Pengelola | ket |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|-----------|----------|----------------|-----|
|    |                                                                  |        |               | APBN        | APBD Prov | APBD Kab |                |     |
| 1  | 5                                                                | 6      | 7             | 8           | 9         | 10       | 11             | 12  |
| i  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |        | 3.661.089.582 |             |           | √        | DPSAKB         |     |
| 1  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |        | 29.000.000    |             |           | √        | DPSAKB         |     |
| 2  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |        | 3.091.075.482 |             |           | √        | DPSAKB         |     |
| 3  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |        | 31.500.000    |             |           | √        | DPSAKB         |     |
| 4  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |        | 90.000.000    |             |           | √        | DPSAKB         |     |
| 5  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |        | 194.394.300   |             |           | √        | DPSAKB         |     |
| 6  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |        | 78.000.000    |             |           | √        | DPSAKB         |     |
| 7  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |        | 101.119.800   |             |           | √        | DPSAKB         |     |



|     |                                                                                                                                   |  |             |  |  |   |        |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--|---|--------|--|
| 8   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             |  | 46.000.000  |  |  | √ | DPSAKB |  |
| II  | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                         |  | 160.000.000 |  |  | √ | DPSAKB |  |
| 1   | <i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>                                 |  | 30.000.000  |  |  | √ | DPSAKB |  |
| 2   | <i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |  | 100.000.000 |  |  | √ | DPSAKB |  |
| 3   | <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>                       |  | 30.000.000  |  |  | √ | DPSAKB |  |
| III | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                    |  | 314.504.000 |  |  | √ | DPSAKB |  |
| 1   | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                             |  | 284.504.000 |  |  | √ | DPSAKB |  |
| 2   | <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>                   |  | 30.000.000  |  |  | √ | DPSAKB |  |
| IV  | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                             |  | 280.000.000 |  |  | √ | DPSAKB |  |
| 1   | <i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>           |  | 250.000.000 |  |  | √ | DPSAKB |  |



|    |                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |   |        |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--|---|--------|--|
| 2  | <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> |  | 30.000.000  |  |  | √ | DPSAKB |  |
| V  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                                                                      |  | 30.000.000  |  |  | √ | DPSAKB |  |
| 1  | <i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>                                          |  | 30.000.000  |  |  | √ | DPSAKB |  |
| 2  | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                                                     |  | 480.000.000 |  |  | √ | DPSAKB |  |
| 3  | <b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                     |  | 330.000.000 |  |  | √ | DPSAKB |  |
| 4  | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                        |  | 150.000.000 |  |  | √ | DPSAKB |  |
| VI | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                                                     |  | 244.296.000 |  |  | √ | DPSAKB |  |
| 1  | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                          |  | 30.000.000  |  |  | √ | DPSAKB |  |
| 2  | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                            |  | 109.700.000 |  |  | √ | DPSAKB |  |



|     |                                                                                                                                                                    |  |               |  |  |   |        |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|--|---|--------|--|
| 3   | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                    |  | 104.596.000   |  |  | √ | DPSAKB |  |
| VII | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                      |  | 311.400.000   |  |  | √ | DPSAKB |  |
| 1   | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                             |  | 311.400.000   |  |  | √ | DPSAKB |  |
| IX  | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                          |  | 3.519.714.000 |  |  | √ | DPSAKB |  |
| 1   | <i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>                                     |  | 1.349.550.000 |  |  | √ | DPSAKB |  |
| 2   | <i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>                                                                                             |  | 738.000.000   |  |  | √ | DPSAKB |  |
| 3   | <i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>                                |  | 989.164.000   |  |  | √ | DPSAKB |  |
| 4   | <i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i> |  | 443.000.000   |  |  | √ | DPSAKB |  |
| X   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                       |  | 1.844.800.000 |  |  | √ | DPSAKB |  |



|   |                                                                                                |  |               |  |  |   |        |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|--|---|--------|--|
| 1 | <i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i> |  | 1.844.800.000 |  |  | v | DPSAKB |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|--|---|--------|--|



## B. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa sasaran adalah merupakan hasil yang akan dicapai dengan formulasi yang spesifik dan strategis, terukur dan dalam kurun waktu dan akan dinilai secara berkesinambungan. Penetapan kinerja DP3AKB tahun 2024 juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen Renstra maupun dokumen RPJMD. Adapun sasaran strategis dalam penetapan kinerja tahun 2024 antara lain :

**Tabel 2.2**  
**Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Tahun 2024**

| NO | Sasaran Strategis                                                                                        | Indikator Kinerja                            | Target | Program/Kegiatan                                                                           | Anggaran      | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 1  | 2                                                                                                        | 3                                            | 4      | 5                                                                                          | 6             | 7   |
| I  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | Nilai Sakip Perangkat Daerah                 |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                | 3.661.089.582 |     |
|    |                                                                                                          |                                              |        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 29.000.000    |     |
|    |                                                                                                          |                                              |        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | 3.091.075.482 |     |
|    |                                                                                                          |                                              |        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                     | 31.500.000    |     |
|    |                                                                                                          |                                              |        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  | 90.000.000    |     |
|    |                                                                                                          |                                              |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         | 194.394.300   |     |
|    |                                                                                                          |                                              |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | 78.000.000    |     |
|    |                                                                                                          |                                              |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 101.119.800   |     |
| II | Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak                       | Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan |        | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                  | 160.000.000   |     |
|    |                                                                                                          |                                              |        | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.000.000    |     |



|     |                               |  |                                                                                                                                                                             |             |  |
|-----|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| III |                               |  | <i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>                                           | 100.000.000 |  |
|     |                               |  | <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>                                                                 | 30.000.000  |  |
|     | Rasio KDRT                    |  | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                                              | 314.504.000 |  |
|     |                               |  | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                       | 284.504.000 |  |
| IV  |                               |  | <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>                                                             | 30.000.000  |  |
|     | Predikat Kabupaten Layak Anak |  | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                                                       | 280.000.000 |  |
|     |                               |  | <i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>                                                    | 250.000.000 |  |
|     |                               |  | <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> | 30.000.000  |  |
| V   |                               |  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                                                             | 30.000.000  |  |
|     |                               |  | <i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>                                          | 30.000.000  |  |
| VI  |                               |  | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                                            | 480.000.000 |  |
|     |                               |  | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           | 330.000.000 |  |
|     |                               |  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               | 150.000.000 |  |
|     |                               |  | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                                            | 244.296.000 |  |
|     |                               |  | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 | 30.000.000  |  |
|     |                               |  | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                   | 109.700.000 |  |
| VII |                               |  |                                                                                                                                                                             |             |  |



|      |                            |                                                    |  |                                                                                                                                                                    |               |  |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| VIII |                            |                                                    |  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                    | 104.596.000   |  |
|      | Menurunnya Angka kelahiran | Penurunan Total angka kelahiran (TFR) (Basis poin) |  | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                      | 311.400.000   |  |
|      |                            |                                                    |  | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                             | 311.400.000   |  |
| IX   |                            |                                                    |  | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                          | 3.519.714.000 |  |
|      |                            |                                                    |  | <i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>                                     | 1.349.550.000 |  |
|      |                            |                                                    |  | <i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>                                                                                             | 738.000.000   |  |
|      |                            |                                                    |  | <i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>                                | 989.164.000   |  |
|      |                            |                                                    |  | <i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i> | 443.000.000   |  |
| X    |                            |                                                    |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                       | 1.844.800.000 |  |
|      |                            |                                                    |  | <i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>                                                                     | 1.844.800.000 |  |



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dalam laporan ini tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- 90 - 100 : Amat baik
- 80 - 89 : Baik
- 50 - 79 : Cukup Baik
- < 50 : Kurang

#### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya adalah merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan dokumen RPJMD 2021-2026. Untuk melihat sejauhmana keberhasilan atau capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja yang bisa diukur. Penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Jumlah Nilai            | Kategori         |
|----|-------------------------|------------------|
| 1  | Lebih dari 100%         | Baik Sekali (BS) |
| 2  | Lebih dari 75% s/d 100% | Baik (B)         |
| 3  | 55% s/d 75%             | Cukup (C)        |
| 4  | Kurang dari 55%         | Kurang (K)       |

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan



dan memperbaiki kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

### 1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Outcome

Secara umum kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dikatakan masih belum berhasil sepenuhnya, dengan beberapa catatan mengenai kegiatan yang tidak dilaksanakan atau belum mencapai target seperti yang diharapkan, yaitu:

#### a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai Sakip Perangkat Daerah dimana adalah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan Target yang dicanangkan pada indikator ini untuk tahun 2024 adalah sebesar 67 dan hasil yang dicapai sebesar 58,40. Capaian kinerjanya adalah sebesar 92.7%. Target belum mencapai 100%( hasil penilaian sakip tahun 2022) dikarenakan Aspek Perencanaan masih dalam proses perbaikan, dalam hal ini perbaikan dokumen RENSTRA.

**Tabel**  
**Nilai Sakip Perangkat**  
**Tahun 2023 s/d 2024**

| NO | Indikator Kinerja            | Thn 2023 |           |             | Thn 2024 |           |             | Perbandingan |             | Jangka Menengah 2022 |
|----|------------------------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|    |                              | Target   | Realisasi | Capaian (%) | Target   | Realisasi | Capaian (%) | Realisasi    | Capaian (%) |                      |
| 1  | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 63       | 58,40     | 92,7        |          |           |             | 17,85        | 26,22       | 73                   |



### b. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah perempuan yang bekerja dan menganggur pada usia kerja (15 tahun keatas). Target yang dicanangkan pada indikator ini untuk tahun 2024 adalah sebesar 46,50% dan realisasinya sebesar 84,92% didapat dari 33.612 jumlah total partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi 39.578 jumlah total angkatan kerja perempuan. Capaian kinerjanya adalah 183,4%. Capaian sudah melebihi target, dikarenakan target yang dicanangkan terlalu rendah sedangkan sudah terdapat banyak lapangan pekerjaan bagi Perempuan( didapat dari data web statistic).

**Tabel**  
**Partisipasi angkatan kerja perempuan**  
**Tahun 2023 s/d 2024**

| No | Indikator Kinerja                    | Thn 2023 |           |             | Thn 2024 |           |             | Perbandingan |             | Jangka Menengah 2024 |
|----|--------------------------------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|    |                                      | Target   | Realisasi | Capaian (%) | Target   | Realisasi | Capaian (%) | Realisasi    | Capaian (%) |                      |
| 1  | Partisipasi angkatan kerja perempuan | 46,30    | 66,12     | 142,81      | 46,50    | 84,92     | 182,6       | 19,24        | 42,06       | 47%                  |

### c. Rasio KDRT.

Dalam mengukur indikator rasio KDRT di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 yakni kasus KDRT berdasarkan data kepolisian Halmahera Utara sebanyak 44 kasus. Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 62346 dengan demikian capaian indikator ini sebesar 0,071% sedangkan target yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 0,060% Dengan demikian pada indikator ini juga tidak mencapai target yang sudah ditetapkan karena kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah.

**Tabel**  
**Capaian Rasio KDRT**  
**Tahun 2023 s/d 2024**

| No | Indikator Kinerja | Thn 2023 |           |             | Thn 2024 |           |             | Perbandingan |             | Jangka Menengah 2023 |
|----|-------------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|    |                   | Target   | Realisasi | Capaian (%) | Target   | Realisasi | Capaian (%) | Realisasi    | Capaian (%) |                      |
| 1  | Rasio KDRT        | 0,063    | 0,081     | -18         | 0,060    | 0,071     | -11         | -0,005       | -59,17      | 0,04                 |

**d. Predikat Kabupaten Layak Anak**

Predikat Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Target yang dicanangkan di tahun 2024 adalah 601, dan realisasi yang dicapai adalah 518( hasil penilaian tahun 2023 untuk pehasil kla 2024 masih dalam tahap penilaian). Capaian Kinerjanya adalah 87.75 %. Belum mencapai target dikarenakan masih banyak data data yang belum teradministrasi dengan baik, salah satunya masih sangat kurangnya SK Desa Ramah Anak yang terbentuk. Dari 196 desa yang ada di Halmahera utara , yang telah mempunyai SK Desa Ramah Anak baru sebanyak 14 Desa.( masih dalam tahap penilaian)

**Tabel**  
**Predikat Kabupaten Layak Anak**  
**Tahun 2023 s/d 2024**

| No | Indikator Kinerja             | Thn 2023 |           |             | Thn 2024 |           |             | Perbandingan |             | Jangka Menengah 2024 |
|----|-------------------------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|    |                               | Target   | Realisasi | Capaian (%) | Target   | Realisasi | Capaian (%) | Realisasi    | Capaian (%) |                      |
| 1  | Predikat Kabupaten Layak Anak | 501      | 351       | 87.75       |          |           |             | 191          | -230,5      | 800                  |

**e. Total angka kelahiran (TFR)**

Total angka kelahiran (TFR) adalah rata rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya. Cara penghitungannya adalah dengan cara menjumlahkan angka kelahiran menurut umur (ASFR) dikalikan dengan interval kelompok umur (5). yaitu  $5 \times 342,31 = 1.711,55$  Per 1000 Penduduk Usia 19-49 Tahun di Kabupaten Halmahera Utara. Target yang dicanangkan adalah 2,35 dan realisasi yang di dapat adalah 1.7 Capaiannya adalah 72,34%. Dengan demikian indikator TFR telah melebihi target, dikarenakan semakin banyak



Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi di kabupaten Halmahera utara.

Tabel

Total angka kelahiran (TFR)  
Tahun 2023 s/d 2024

| NO | Indikator Kinerja           | Thn 2023 |           |             | Thn 2024 |           |             | Perbandingan |             | Jangka Menengah 2024 |
|----|-----------------------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|    |                             | Target   | Realisasi | Capaian (%) | Target   | Realisasi | Capaian (%) | Realisasi    | Capaian (%) |                      |
| 1  | Total angka kelahiran (TFR) | 2,40     | 1.964     | 134,57      | 2,35     | 1,7       | 72,34       | 0,71         | 27,37       | 2,25                 |

## 2. Kinerja output Tahun 2023 dan Tahun 2024

Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap realisasi kinerja Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.1 Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja            | Program/Kegiatan                                                 | Realisasi Output |           | Keterangan |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|
|    |                              |                                                                  | 2023             | 2024      |            |
| 1  | 2                            | 3                                                                | 4                | 5         | 6          |
| 1  | NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                  |           |            |
|    |                              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                  |           |            |
|    |                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 3 Dokumen        | 3 Dokumen |            |
|    |                              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | 1 Dokumen        | 1 Dokumen |            |
|    |                              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | 1 Dokumen        | 1 Dokumen |            |
|    |                              | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | 1 Dokumen        | 1 Dokumen |            |
|    |                              | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                     | 1 Dokumen        | 1 Dokumen |            |



|                                                                                       |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan  | 4 Laporan  |  |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |            |            |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 511 bln    | 676        |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 4 laporan  | 12 laporan |  |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |            |            |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 0 paket    | -          |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 2 org      | -          |  |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             |            |            |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 12 paket   | 2 paket    |  |
| Pengadaan Bahan Logistik Kantor                                                       | 12 paket   | 12 paket   |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 12 paket   | 12 paket   |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 12 dokumen | 12 dokumen |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 12 laporan | 12 laporan |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 24 laporan | 12 laporan |  |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               |            |            |  |
| Pengadaan Mebel                                                                       | 9 unit     | -          |  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           |            |            |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 12 laporan | 7 laporan  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 12 laporan | 12 laporan |  |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | 1 laporan  | 4 laporan  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 11 laporan | 7 laporan  |  |



|   |                                               |                                                                                                                                               |                    |                    |  |
|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
|   |                                               | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                              |                    |                    |  |
|   |                                               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                               | 5 unit             | 5 unit             |  |
|   |                                               |                                                                                                                                               |                    |                    |  |
| 2 | Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan. | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                                              |                    |                    |  |
|   |                                               | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                              |                    |                    |  |
|   |                                               | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG                                                                                           | 2 Perangkat Daerah | 1 Perangkat Daerah |  |
|   |                                               | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>             |                    |                    |  |
|   |                                               | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                    | 2 dokumen          | 1 dokumen          |  |
|   |                                               | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                   |                    |                    |  |
|   |                                               | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                         | -                  | -                  |  |
|   |                                               |                                                                                                                                               |                    |                    |  |
|   |                                               | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                                         |                    |                    |  |
| 3 | Rasio KDRT                                    | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                  |                    |                    |  |
|   |                                               | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 1 dokumen          |                    |  |
|   |                                               |                                                                                                                                               |                    |                    |  |
|   |                                               | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                                  |                    |                    |  |



|   |                               |                                                                                                                                                 |                    |                    |  |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
|   |                               | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                        |                    |                    |  |
|   |                               | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                         | 1 Perangkat Daerah | 1 Perangkat Daerah |  |
|   |                               |                                                                                                                                                 |                    |                    |  |
| 4 | Predikat Kabupaten Layak Anak | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                                          |                    |                    |  |
|   |                               | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>              |                    |                    |  |
|   |                               | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | 1 dokumen          | -                  |  |
|   |                               |                                                                                                                                                 |                    |                    |  |
|   |                               | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                         | 14 indikator       | 14 indikator       |  |
|   |                               | <b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                        |                    |                    |  |
|   |                               | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 0                  | 2 Organisasi       |  |
|   |                               | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            | 1 dokumen          | -                  |  |
|   |                               | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>                                                      |                    |                    |  |
|   |                               | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    | 6 unit mainan      | -                  |  |
|   |                               | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah  | 1 dokumen          | -                  |  |
|   |                               |                                                                                                                                                 |                    |                    |  |
|   |                               | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                         |                    |                    |  |



|   |                                       |                                                                                                                                                            |               |               |  |
|---|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
|   |                                       | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah</b>                                                                        |               |               |  |
|   |                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten                                                                        | 1 Layanan     | 4 Layanan     |  |
|   |                                       | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                     |               |               |  |
|   |                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | 1 Layanan     | -             |  |
| 5 | Penurunan Total Angka Kelahiran (TFR) | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                                       |               |               |  |
|   |                                       | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                              |               |               |  |
|   |                                       | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan                                                                                                                   | 1Laporan      | 1Laporan      |  |
|   |                                       | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga                                                                                                                     | 17Laporan     | 17Laporan     |  |
|   |                                       | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                       | 196 Laporan   | 196 Laporan   |  |
|   |                                       | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                                                           |               |               |  |
|   |                                       | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>                             |               |               |  |
|   |                                       | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                                 | 28 Organisasi | 28 Organisasi |  |
|   |                                       | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                         | 17 Dokumen    | 17 Dokumen    |  |
|   |                                       | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK                                                                                                         | -             | -             |  |
|   |                                       | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                              | 17 Dokumen    | 17 Dokumen    |  |
|   |                                       | Pelaksanaan Mekanisme Operasional ProgramKKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),dan Mini Lokakarya (Minilok) | 28 laporan    | 28 laporan    |  |



|  |  |                                                                                                                                                                    |                       |                       |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|  |  | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK                                                                                                       | 17 laporan balai updt | 17 laporan balai updt |  |
|  |  | Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                         | 17 laporan balai updt | 17 laporan balai updt |  |
|  |  | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                                                             |                       |                       |  |
|  |  | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                              | 196 desa              | 196 desa              |  |
|  |  | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                |                       |                       |  |
|  |  | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                  | 23 Laporan            | 39                    |  |
|  |  | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                          | 1127 orang            | 1127 orang            |  |
|  |  | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                           | 17 unit               | -                     |  |
|  |  | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                           | 1 laporan             | 1 laporan             |  |
|  |  | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan                                                  | 25 orang              | 25 orang              |  |
|  |  | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b> |                       |                       |  |
|  |  | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB                                                                                                            | 28 unit               | 28 unit               |  |
|  |  | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                                  |                       | 1 Dokumen             |  |
|  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                |                       |                       |  |
|  |  | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota</b>                                                      |                       |                       |  |



|  |  |                                                                                                                                                                                                      |            |            |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
|  |  | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                        | 20 unit    | 31 unit    |  |
|  |  | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 196 desa   | 196 desa   |  |
|  |  | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                 | 10 laporan | 10 laporan |  |

### 3. Analisis atas efisiensi Program dan pendanaan.

Sumberdaya keuangan/anggaran dapat dikatakan cukup dalam pengelolaan kegiatan yang menghasilkan output dan outcome yang cukup baik. Capaian penggunaan anggaran Tahun 2024 diukur dengan menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

| No | Jumlah Nilai            | Kategori            |
|----|-------------------------|---------------------|
| 1  | Lebih dari 100%         | Sangat Efisien (SE) |
| 2  | Lebih dari 75% s/d 100% | Efisien (E)         |
| 3  | 55% s/d 75%             | Kurang Efisien (KE) |
| 4  | Kurang dari 55%         | Tidak Efisien (TE)  |

Tabel 3.2 Analisis atas efisiensi Program dan pendanaan.

| NO | Sasaran                                                                                                  | Indikator Sasaran                    | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                                        | 3                                    | 4               | 5                   | 6                 |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana | Nilai Sakip Perangkat Daerah         | 58,40           | 72,16               | 80,93             |
| 2  | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak                       | Partisipasi angkatan kerja perempuan | 66,12           | 46,81               | 12,48             |
|    |                                                                                                          | Rasio KDRT                           | 0,071           |                     |                   |
|    |                                                                                                          | Predikat Kabupaten Layak Anak        | 518             |                     |                   |



|   |                            |                                                  |      |       |       |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 3 | Menurunnya Angka Kelahiran | Penurunan total angka kelahiran (TFR basis poin) | 1,71 | 56,69 | 33,15 |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------|------|-------|-------|

Dengan demikian, dari tabel di atas, dapat disimpulkan capaian efisiensi program dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dinilai **sangat efisien (SE)**. Sedangkan Untuk capaian efisiensi sumber daya manusianya, dapat dikatakan sangat efisien , karena dengan jumlah pegawai 33 orang, mampu melaksanakan kegiatan anggaran yang ditargetkan pelaksanaannya oleh 40 pegawai.

#### 4. Analisis terhadap target dan realisasi kinerja Tahun 2024.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja Tahun 2022. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada

**Tabel 3.3 Analisis terhadap target dan realisasi kinerja Tahun 2024**

| No.   | Kebijakan                                                                                                                    | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja                                     | Satuan        | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Tingkat Capaian Kinerja (%) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| 1     | 4                                                                                                                            | 5                                                                       | 6                                                     | 7             | 8              | 9                 | 10                          |
| 1     | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>     | <b>Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>       | <b>Persen</b> | <b>90,00</b>   | <b>83,75</b>      | <b>93,06</b>                |
| 1.1   |                                                                                                                              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Tingkat konsisten perencanaan perangkat daerah</b> | <b>Persen</b> | <b>100,00</b>  | <b>77,00</b>      | <b>77,00</b>                |
| 1.1.1 |                                                                                                                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah           | dokumen       | 5              | 5                 | 100,00                      |



|          |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |               |               |              |               |
|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1.1.2    |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | dokumen       | 1             | 1            | 100,00        |
| 1.1.4    |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | dokumen       | 1             | 1            | 100,00        |
| 1.1.5    |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | dokumen       | 1             | 0            | 0,00          |
| 01:01:06 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan       | 3             | 3            | 100,00        |
| 1.2      |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah</b>                                                                                                         | <b>Persen</b> | <b>100,00</b> | <b>47,74</b> | <b>47,74</b>  |
| 1.2.1    |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang         | 676           | 406          | 60,06         |
| 1.2.2    |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | laporan       | 4             | 4            | 100,00        |
|          |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Persentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat</b>                                                                                              | <b>Persen</b> | <b>100</b>    | <b>100</b>   | <b>100,00</b> |
|          |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      | laporan       | 1             | 1            | 100,00        |
|          |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | laporan       | 1             | 1            | 100,00        |



|       |  |                                                                         |                                                                                        |               |               |               |               |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada DKPD                             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | laporan       | 1             | 1             | 100,00        |
| 1.3   |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>Cakupan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah</b>                               | <b>Persen</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1.3.2 |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang         | 1             | 0             | 0,00          |
| 1.4   |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persen</b> | <b>100,00</b> | <b>68,33</b>  | <b>68,33</b>  |
| 1.4.1 |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | Paket         | 1             | 0             | 0,00          |
| 1.4.2 |  | Pengadaan Bahan Logistik Kantor                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | Paket         | 12            | 12            | 100,00        |
| 1.4.3 |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | Paket         | 12            | 12            | 100,00        |
| 1.4.5 |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | laporan       | 12            | 12            | 100,00        |
| 1.4.6 |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | laporan       | 24            | 10            | 41,67         |
| 1.5   |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>        | <b>Persen</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1.5.1 |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | unit          | 1             | 1             | 100,00        |



|       |                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                        |               |               |               |               |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.6   |                                                      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Cakupa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Persen</b> | <b>100,00</b> | <b>54,17</b>  | <b>54,17</b>  |
| 1.6.1 |                                                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | Laporan       | 12            | 12            | 100,00        |
| 1.6.2 |                                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan       | 12            | 3             | 25,00         |
| 1.6.3 |                                                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Laporan       | 12            | 4             | 33,33         |
| 1.6.4 |                                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan       | 12            | 7             | 58,33         |
| 1.7   |                                                      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                   | <b>Persen</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1.7.1 |                                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit          | 5             | 5             | 100,00        |
| 2     | <b>Pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak</b> | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                | <b>Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD</b>                           | <b>Persen</b> | <b>45,30</b>  | <b>13,21</b>  | <b>29,17</b>  |
| 2.1   |                                                      | <b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>               | <b>Cakupan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>          | <b>Persen</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |



|       |  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                         |        |        |        |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 2.1.1 |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                                                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Perang<br>kat<br>Daerah | 2      | 2      | 100,00 |
| 2.2   |  | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten /Kota</b>            | <b>Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                                         | Persen                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2.1 |  | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten /Kota                                              | Dok                     | 2      | 2      | 100,00 |
| 3     |  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                                         | <b>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani/ditangani hingga selesai</b>                                                                                                    | Persen                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.1   |  | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                  | <b>Cakupan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota</b>                                                                                                    | Persen                  | 100,00 | 100    | 100,00 |
| 3.1.1 |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                              | Orang                   | 1      | 1      | 100,00 |
| 4     |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                                  | <b>Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>                                                                                               | Persen                  | 26,10  | 38,59  | 147,85 |



|       |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |            |        |        |        |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| 4.1   |  | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota</b>                        | <b>Cakupan Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                 | Persen     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1.1 |  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten /Kota                                        | Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten /Kota                                                                                   | OPD        | 1      | 1      | 100,00 |
| 6     |  | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                         | <b>Skor Nilai Indikator Kabupaten Layak Anak yang Telah terpenuhi</b>                                                                                                                                      | Skor       | 501    | 518    | 103,39 |
| 6.1   |  | <b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                        | <b>Cakupan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha</b>                                                                                                                                 | Persen     | 0,63   | 0,63   | 100,00 |
| 6.1.1 |  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | Organisasi | 2      | 2      | 0,63   |
| 7     |  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                         | <b>Persentasi korban kekerasan anak yang terlayani/ ditangani hingga selesai oleh instansi terkait</b>                                                                                                     | Persen     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7.2   |  | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten /Kota</b>               | <b>Persentase capain Layanan pendampingan bagi Anak korban kekerasan yang Memerlukan Penanganan Khusus ( Anak disabilitas)</b>                                                                             | Persen     | 100,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2.1 |  | Koordinasi Pelaksanaan layanan AMPK                                                                                                             | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan                                                                                                                                                                       | Layanan    | 38     | 43     | 110,00 |



|       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |         |               |               |               |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|       |                                                     | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah lembaga yang menyediakan pendampingan bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>                                      |         | 100           | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|       |                                                     | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/                     | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK                                  | orang   | 1             | 1             | 100,00        |
| 8     | <b>Pengendalian penduduk dan keluarga berencana</b> | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                   | <b>Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)</b>                                                                            | Persen  | <b>11,00</b>  | <b>14,14</b>  | <b>128,55</b> |
| 8.1   |                                                     | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                          | <b>Cakupan data Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                | Persen  | <b>100,00</b> | <b>50,00</b>  | <b>50,00</b>  |
| 8.1.2 |                                                     | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                               | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                | laporan | 1             | 1             | 100,00        |
|       |                                                     | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                   | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                    | Dok     | 196           | 196           | 100,00        |
| 9     |                                                     | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                                       | <b>persentase pemakaian kontrasepsi moderan (mCPR)</b>                                                                                 | Persen  | <b>18,90</b>  | <b>59,2</b>   | <b>313,12</b> |
|       |                                                     |                                                                                                                                        | <b>Persentasi kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmeet need)</b>                                                                   | Persen  | <b>14,70</b>  | <b>8,4</b>    | <b>57,45</b>  |
| 9.1   |                                                     | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>         | <b>Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b> | Persen  | <b>100,00</b> | <b>76,79</b>  | <b>76,79</b>  |
| 9.1.1 |                                                     | Pengendalian Program KKBPK                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK                                                                                        | laporan | 28            | 28            | 100,00        |



|       |  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |        |        |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| 9.1.3 |  | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                | la         | 17     | 17     | 100,00 |
| 9.1.4 |  | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | laporan    | 28     | 28     | 100,00 |
| 9.1.5 |  | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                               | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                     | laporan    | 17     | 17     | 100,00 |
| 9.1.6 |  | Advokasi Program Bangsa kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                              | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                    | Organisasi | 28     | 17     | 60,71  |
| 9.2   |  | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                                                               | <b>Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                                                                                                                         | Persen     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9.2.1 |  | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                                      | orang      | 196    | 196    | 100,00 |
| 9.3   |  | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota</b>                                 | <b>Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota</b>                                                                                          | Persen     | 100,00 | 19,33  | 19,33  |
| 9.3.2 |  | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                                                              | Orang      | 1127   | 1089   | 96,63  |



|       |  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |            |        |        |        |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| 9.3.4 |  | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                           | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                              | laporan    | 1      | 0      | 0,00   |
| 9.4   |  | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b> | <b>Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b> | Persen     | 100,00 | 66,67  | 66,67  |
|       |  | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                     |            | 1      | 1,00   | 100,00 |
|       |  | Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                          | <i>Jumlah DASHAT di Kampung KB</i>                                                                                                                                         | Unit       | 28     | 0,00   | 0,00   |
| 9.4.1 |  | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di kampung Keluarga Berkualitas                                                                                 | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB             | Kampung KB | 28     | 28     | 100,00 |
| 10    |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                | <b>Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (persen)</b>                                                                                                    | %          | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10.1  |  | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                     | <b>Persentase capaian keluarga yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>                                                                         | Persen     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



|            |  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |         |     |     |        |
|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|--------|
| 10.1.<br>1 |  | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                   | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | orang   | 10  | 10  | 100,00 |
|            |  | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                          | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                       | unit    | 28  | 28  | 100,00 |
| 10.1.<br>2 |  | <b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b> | <b>Persentase masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                                                          | Persen  | 100 | 100 | 100,00 |
|            |  | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting ( Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/Balita)                                  | Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)                                         | laporan | 196 | 196 | 100,00 |
| 10.1.<br>3 |  | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting ( Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/Balita)                                                   | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan                                              | laporan | 196 | 196 | 100,00 |



## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mempertanggungjawabkan pemakaian keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2024 yang lalu, maka akan diurai berapa alokasi anggaran yang digunakan dan seberapa besar realisasi anggaran yang terpakai dalam menjalankan program dan kegiatan pada tahun anggaran yang lalu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2024**

| Ko<br>de        | Program/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan                               | Indikator<br>Program/Kegiatan<br>/Sub Kegiatan                                   | Kinerja           |                   | Plafon Anggran (Rp)  |                      | realisasi<br>anggaran | Ket   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|                 |                                                                |                                                                                  | Target<br>Sebelum | Target<br>Sesudah | Sebelum<br>Perubahan | Setelah<br>Perubahan |                       |       |
| 2-08            | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                   |                                                                                  |                   |                   |                      |                      |                       |       |
| 2-08.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    | Tingkat capaian kinerja perangkat Daerah                                         | 90,00             | 90,00             | 3.109.854.327        | 2.764.164.006        | 2.136.378.070         | 77,29 |
| 2-08.01.2.01    | Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentasi capaian Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Dinas           | 100,00            | 100,00            | 26.266.900           | 25.266.900           | 15.288.600            | 60,51 |
| 2-08.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 5                 | 5                 | 15.000.000           | 15.000.000           | 13.349.300            | 89,00 |
| 2-08.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1                 | 1                 | 3.000.000            | 3.000.000            | 979.300               | 32,64 |



|            |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |        |        |               |               |               |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 2-08.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1      | 1      | 1.000.000     | -             | -             | #DIV/0! |
| 2-08.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1      | 1      | 1.000.000     | 1.000.000     | -             | 0,00    |
| 2-08.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1      | 1      | 1.000.000     | 1.000.000     | 960.000       | 96,00   |
| 2-08.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3      | 3      | 5.266.900     | 5.266.900     |               | 0,00    |
| 2-08.02.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                              | 100,00 | 100,00 | 2.564.509.430 | 2.432.031.113 | 1.963.988.540 | 80,76   |
| 2-08.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 350    | 406    | 2.558.209.430 | 2.425.731.113 | 1.957.697.540 | 80,71   |



|                 |                                                                   |                                                                                                                    |               |               |                   |                   |                   |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2-08.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4             | 4             | 6.300.000         | 6.300.000         | 6.291.000         | 99,86         |
| 2-08.01.2.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>     | <b>Persentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat</b>                                          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>26.500.000</b> | <b>26.366.300</b> | <b>26.366.300</b> | <b>100,00</b> |
| 2-08.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                  | 1             | 1             | 500.000           | 366.300           | 366.300           | 100,00        |
| 2-08.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 1             | 1             | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 100,00        |
| 2-08.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada DKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 1             | 1             | 25.000.000        | 25.000.000        | 25.000.000        | 100,00        |
| 2-08.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | <b>Persentase capaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah</b>                                                | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>89.999.400</b> | <b>316.000</b>    | <b>316.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 2-08.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | 4             | 4             | 89.999.400        | 316.000           | 316.000           | 100,00        |



|                 |                                                                  |                                                                              |        |        |             |            |            |         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|------------|------------|---------|
| 2-08.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100,00 | 100,00 | 182.553.700 | 82.034.300 | 56.013.100 | 68,28   |
| 2-08.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 12     | 12     | 15.477.700  | 15.477.700 | 14.374.500 | 92,87   |
| 2-08.01.2.06.04 | Pengadaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 12     | 12     | 15.073.000  | 15.073.000 | 9.652.800  | 64,04   |
| 2-08.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 12     | 12     | 7.999.600   | 7.999.600  | 4.894.800  | 61,19   |
| 2-08.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12     | 12     | 5.999.700   | -          | -          | #DIV/0! |
| 2-08.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 12     | 12     | 8.004.000   | 8.004.000  | 5.681.000  | 70,98   |
| 2-08.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 24     | 24     | 129.999.700 | 35.480.000 | 21.410.000 | 60,34   |
| 2-08.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase capain ketersediaan Barang Milik Daerah                           | 82     | 82     | 78.000.000  | 78.000.000 | 58.500.000 | 75,00   |



|               |                                                                              |                                                                                                |               |               |                   |                   |                   |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2-08.01.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            | 1             | 1             | 78.000.000        | 78.000.000        | 58.500.000        | 75,00        |
| 2-08.01.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase capaian Penyediaan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>         | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>96.024.897</b> | <b>74.149.393</b> | <b>4.077.000</b>  | <b>5,50</b>  |
| 2-08.01.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 12            | 12            | 26.833.300        | 15.193.300        | 2.460.000         | 16,19        |
| 2-08.01.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 12            | 12            | 16.201.893        | 15.094.393        | 160.000           | 1,06         |
| 2-08.01.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 12            | 12            | 27.990.000        | 27.990.000        | -                 | 0,00         |
| 2-08.01.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 12            | 12            | 24.999.704        | 15.871.700        | 1.457.000         | 9,18         |
| 2-08.01.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase capain Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>46.000.000</b> | <b>46.000.000</b> | <b>11.828.530</b> | <b>25,71</b> |



|                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |       |       |             |             |             |       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 2-08.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                     | 5     | 5     | 46.000.000  | 46.000.000  | 11.828.530  | 25,71 |
| 2-08.02         | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                                  | <b>Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD</b>                                                               | 45,30 | 45,30 | 289.999.400 | 228.879.800 | 100.000.000 | 43,69 |
| 2-08.02.2.01    | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                  | <b>persentase capain perempuan di Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                         | 5,30  | 5,30  | 59.999.800  | 28.879.800  |             | 0,00  |
| 2-08.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota                 | 100   | 100   | 59.999.800  | 28.879.800  |             | 0,00  |
| 2-08.02.2.02    | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase capain perempuan yang menduduki di lembaga legislatif daerah</b>                                                             | 20    | 20    | 200.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000 | 50,00 |
| 2-08.02.2.02.01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                        | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten /Kota | 2     | 2     | 200.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000 | 50,00 |



|            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |     |     |             |             |             |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|---------|
| 2-08.02.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                   | 12  | 12  | 29.999.600  | -           |             | #DIV/0! |
| 2-08.02.03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                               | 1   | 1   | 29.999.600  | -           |             | #DIV/0! |
| 2-08.03    | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                | Persentasi korban kekerasan perempuan yang terlayani/ditangan i hingga selesai                                                                                     | 100 | 100 | 291.967.500 | 231.967.800 | 175.030.625 | 75,45   |
| 2-08.03.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Cakupan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota                                                                                      | 5   | 5   | 261.967.800 | 231.967.800 | 175.030.625 | 75,45   |
| 2-08.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 1   | 1   | 231.967.800 | 231.967.800 | 175.030.625 | 75,45   |
| 2-08.03.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | 4   | 4   | 30.000.000  | -           |             | #DIV/0! |



|                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |       |       |             |             |             |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 2-08.03.2.03    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                 | <b>Persentase capain layanan pendampingan perlindungan Perempuan</b>                                                                                         | 0,092 | 0,092 | 29.999.700  | -           |             | #DIV /0! |
| 3.3.1           | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 20    | 20    | 29.999.700  | -           |             | #DIV /0! |
| 2-08.04         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                    | <b>Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>                                                                    | 26,10 | 26,10 | 405.745.383 | 341.736.279 | 297.172.162 | 86,96    |
| 2-08.04.2.01    | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>         | <b>Persentase capain Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                         | 38    | 38    | 405.745.383 | 341.736.279 | 297.172.162 | 86,96    |
| 2-08.04.2.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                         | Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten /Kota                         | 1     | 1     | 405.745.383 | 341.736.279 | 297.172.162 | 86,96    |



|                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |             |            |           |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|------------|-----------|----------|
| 2-08.05         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                             | Persentase jumlah jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingkat kabupaten | 100  | 100  | 29.999.900  | -          | -         | #DIV /0! |
| 2-08.05.2.01    | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase capaian data terpilah gender dan anak                                                                                               | 100  | 100  | 29.999.900  | -          | -         | #DIV /0! |
| 2-08.05.2.01.02 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Dokumen penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota                              | 1    | 1    | 29.999.900  | -          | -         | #DIV /0! |
| 2-08.06         | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                            | Persentase indikator Kabupaten Layak Anak yang terpenuhi                                                                                       | 14   | 14   | 259.999.400 | 69.039.000 | 5.925.000 | 8,58     |
| 2-08.06.2.01    | <b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                           | Persentase capaian PHA yang terakomodir pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                      | 0,63 | 0,63 | 150.000.000 | 69.039.000 | 5.925.000 | 8,58     |



|            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |    |    |             |            |           |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|------------|-----------|----------|
| 2-08.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 2  | 2  | 150.000.000 | 69.039.000 | 5.925.000 | 8,58     |
| 2-08.02.02 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>                                                                    | <b>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>                                                                                                                                     | 3  | 3  | 109.999.400 | -          |           | #DIV /0! |
| 2-08.02.01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                  | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | 35 | 35 | 49.999.900  | -          |           | #DIV /0! |
| 2-08.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                     | 1  | 1  | 29.999.500  | -          |           | #DIV /0! |
| 2-08.02.03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | 1  | 1  | 30.000.000  | -          |           | #DIV /0! |



|                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |        |        |             |             |            |             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 2.08                              | <b>PROGRAM<br/>PERLINDUNGAN<br/>KHUSUS ANAK</b>                                                                                                                | <b>Persentasi korban<br/>kekerasan anak<br/>yang<br/>terlayani/ditangan<br/>i hingga selesai<br/>oleh instansi<br/>terkait</b>                                 | 100,00 | 100,00 | 334.500.000 | 304.500.000 | 68.048.225 | 22,3<br>5   |
| 2.08<br>.07.<br>2.01              | <b>Pencegahan Kekerasan<br/>Terhadap Anak yang<br/>Melibatkan para Pihak<br/>Lingkup Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                                             | <b>Persentase<br/>capaian layanan<br/>pendampingan<br/>anak korban<br/>kekerasan</b>                                                                           | 0,051  | 0,051  | 30.000.000  | -           | 68.048.225 | #DIV<br>/0! |
| 2.08<br>.07.<br>2.01              | Advokasi dan pendampingan<br>Perangkat Daerah dalam<br>pelaksanaan kebijakan<br>/program/ kegiatan<br>pencegahan KTA                                           | Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi<br>dan Sinkronisasi<br>Pencegahan<br>Kekerasan<br>Terhadap Anak<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                             |        |        | 30.000.000  | -           | 68.048.225 | #DIV<br>/0! |
| 2.08<br>.07.<br>2.02              | <b>Penyediaan Layanan bagi<br/>Anak yang Memerlukan<br/>Perlindungan Khusus yang<br/>Memerlukan Koordinasi<br/>Tingkat Daerah<br/>Kabupaten /Kota</b>          | <b>Persentase capain<br/>Layanan<br/>pendampingan<br/>bagi Anak korban<br/>kekerasan yang<br/>Memerlukan<br/>Penanganan<br/>Khusus ( Anak<br/>disabilitas)</b> | 100    | 100    | 235.480.000 | 235.480.000 |            | 0,00        |
| 2.08<br>.07.<br>2.02<br>.000<br>6 | Koordinasi Pelaksanaan<br>layanan AMPK                                                                                                                         | Jumlah AMPK<br>yang mendapatkan<br>layanan                                                                                                                     | 1      | 1      | 235.480.000 | 235.480.000 |            | 0,00        |
| 2.08<br>.07.<br>2.03              | <b>Penguatan dan<br/>Pengembangan Lembaga<br/>Penyedia Layanan bagi<br/>Anak yang Memerlukan<br/>Perlindungan Khusus<br/>Tingkat Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah lembaga<br/>yang menyediakan<br/>pendampingan<br/>bagi anak yang<br/>Memerlukan<br/>Perlindungan<br/>Khusus</b>                                      | 4      | 4      | 69.020.000  | 69.020.000  |            | 0,00        |



|                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                 |              |              |                      |                      |                      |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2.08<br>.07.<br>2.03<br>.000<br>5 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK                           | 1            | 1            | 69.020.000           | 69.020.000           | -                    | 0,00        |
| 2.14<br>.02                       | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                               | <b>Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)</b>                                                                     | <b>11</b>    | <b>11</b>    | <b>349.200.000</b>   | <b>349.200.000</b>   | <b>128.200.000</b>   | 36,7<br>1   |
| 2.14<br>.02.<br>2.02              | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                      | <b>persentase capaian ketersediaan data Remaja umur 15-19 tahun</b>                                                             | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>349.200.000</b>   | <b>349.200.000</b>   | <b>128.200.000</b>   | 36,7<br>1   |
| 2.14<br>.02.<br>2.02<br>.001<br>2 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                           | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                         | 1            | 1            | 145.200.000          | 145.200.000          | -                    | 0,00        |
| 2.14<br>.02.<br>2.02<br>.001<br>3 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                               | Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 196          | 196          | 204.000.000          | 204.000.000          | 128.200.000          | 62,8<br>4   |
| 2.14<br>.02                       | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                   | <b>persentase pemakaian kontrasepsi moderan (mCPR)</b>                                                                          | <b>18,90</b> | <b>18,90</b> | <b>3.966.866.296</b> | <b>3.906.850.996</b> | <b>2.702.494.996</b> | 69,1<br>7   |
|                                   |                                                                                                                    | <b>Persentasi kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmeet need)</b>                                                            | <b>14,70</b> | <b>14,70</b> |                      |                      |                      | #DIV<br>/0! |



|                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |                      |                      |                      |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2.14<br>.03.<br>2.01              | <b>Pelaksanaan Advokasi,<br/>Komunikasi, Informasi<br/>dan Edukasi (KIE)<br/>Pengendalian Penduduk<br/>dan KB sesuai Kearifan<br/>Budaya Lokal</b>                                         | <b>Persentase<br/>capaian desa yang<br/>mendapatkan<br/>sosialisasi</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>1.420.428.700</b> | <b>1.420.428.700</b> | <b>1.141.462.300</b> | <b>80,3<br/>6</b> |
| 2.14<br>.03.<br>2.01<br>.000<br>8 | Pengendalian Program<br>KKBPK                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengendalian<br>Program KKBPK                                                                                                                                                                                                                                  | 17         | 17         | 143.868.000          | 143.868.000          | 104.015.000          | 72,3<br>0         |
| 2.14<br>.03.<br>2.01<br>.001<br>0 | Pengelolaan Operasional dan<br>Sarana di Balai Penyuluhan<br>Bangga Kencana                                                                                                                | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengelolaan<br>Operasional dan<br>Sarana di Balai<br>Penyuluhan Bangga<br>Kencana<br>(Pembangunan<br>Keluarga,<br>Kependudukan, dan<br>Keluarga<br>Berencana)                                                                                                  | 17         | 17         | 701.489.500          | 701.489.500          | 653.090.500          | 93,1<br>0         |
| 2.14<br>.03.<br>2.01<br>.001<br>1 | Pelaksanaan Mekanisme<br>Operasional Program<br>Bangga Kencana melalui<br>Rapat Koordinasi<br>Kecamatan(Rakorcam),<br>Rapat Koordinasi Desa<br>(Rakordes), dan Mini<br>Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan<br>Mekanisme<br>Operasional<br>Program Bangga<br>Kencana<br>(Pembangunan<br>Keluarga,<br>Kependudukan, dan<br>Keluarga<br>Berencana) Melalui<br>Rapat Koordinasi<br>Kecamatan<br>(Rakorcam), Rapat<br>Koordinasi Desa<br>(Rakordes), dan<br>Mini Lokakarya<br>(Minilok) | 28         | 28         | 255.000.000          | 255.000.000          | 228.735.000          | 89,7<br>0         |
| 2.14<br>.03.<br>2.01<br>.001<br>2 | Promosi dan KIE Program<br>Bangga Kencana Melalui<br>Media Massa Cetak dan<br>Elektronik serta Media Luar<br>Ruang                                                                         | Jumlah Dokumen<br>Promosi dan KIE<br>Program Bangga<br>Kencana<br>(Pembangunan<br>Keluarga,<br>Kependudukan, dan<br>Keluarga<br>Berencana) Melalui<br>Media Massa Cetak<br>dan Elektronik serta<br>Media Luar Ruang                                                                    | 17         | 17         | 100.000.000          | 100.000.000          | 59.951.200           | 59,9<br>5         |



|                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |            |            |                    |                    |                    |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 2.14<br>.03.<br>2.01<br>.001<br>4 | Advokasi Program Bangsa kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                           | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 28         | 28         | 220.071.200        | 220.071.200        | 95.670.600         | 43,4<br>7   |
| 2.14<br>.03.<br>2.02              | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                                            | <b>Persentase capain Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) sarana</b>                                                                                   | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>735.600.000</b> | <b>735.600.000</b> | <b>735.600.000</b> | 100,<br>00  |
| 2.14<br>.03.<br>2.02<br>.000<br>4 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB                                                                                                  | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia                                                                                                          | 1          | 1          | -                  | -                  | -                  | #DIV<br>/0! |
| 2.14<br>.03.<br>2.02<br>.000<br>5 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                             | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                   | 196        | 196        | 735.600.000        | 735.600.000        | 735.600.000        | 100,<br>00  |
| 2.14<br>.03.<br>2.03              | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>               | <b>Persentase capaian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | <b>85</b>  | <b>85</b>  | <b>421.087.596</b> | <b>361.072.296</b> | <b>345.683.396</b> | 95,7<br>4   |
| 2.14<br>.03.<br>2.03<br>.000<br>1 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya    | 39         | 39         | -                  | -                  | -                  | #DIV<br>/0! |



|                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |              |              |                      |                      |                    |                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 2.14<br>.03.<br>2.03<br>.000<br>3 | Peningkatan Kesertaan<br>Penggunaan Metode<br>Kontrasepsi Jangka Panjang<br>(MKJP)                                                                                                             | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Kesertaan<br>Penggunaan<br>Metode Kontrasepsi<br>Jangka Panjang<br>(MKJP)                                                           | 1127         | 1127         | 375.687.796          | 345.688.196          | 345.683.396        | 100,<br>00        |
| 2.14<br>.03.<br>2.03<br>.000<br>6 | Penyediaan Sarana<br>Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                                                    | Jumlah Unit Sarana<br>Penunjang<br>Pelayanan KB                                                                                                                       | 17           | 17           | -                    | -                    | -                  | #DIV<br>/0!       |
| 2.14<br>.03.<br>2.03<br>.000<br>8 | Pembinaan Pelayanan<br>Keluarga Berencana dan<br>Kesehatan Reproduksi di<br>Fasilitas Kesehatan termasuk<br>Jaringan dan Jejaringnya                                                           | Jumlah Laporan<br>Hasil Pembinaan<br>Pelayanan Keluarga<br>Berencana dan<br>Kesehatan<br>Reproduksi di<br>Fasilitas Kesehatan<br>Termasuk Jaringan<br>dan Jejaringnya | 1            | 1            | 45.399.800           | 15.384.100           | -                  | 0,00              |
| 2.14<br>.03.<br>2.04              | <b>Pemberdayaan dan<br/>Peningkatan Peran serta<br/>Organisasi<br/>Kemasyarakatan Tingkat<br/>Daerah Kabupaten/Kota<br/>dalam Pelaksanaan<br/>Pelayanan dan Pembinaan<br/>Kesertaan Ber-KB</b> | <b>persentase capain<br/>kampung kb<br/>terhadap jumlah<br/>desa</b>                                                                                                  | <b>14,29</b> | <b>14,29</b> | <b>1.389.750.000</b> | <b>1.389.750.000</b> | <b>479.749.300</b> | <b>34,5<br/>2</b> |
| 2.14<br>.03.<br>2.04<br>.000<br>2 | Integrasi Pembangunan<br>Lintas Sektor di Kampung<br>KB                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Hasil Integrasi<br>Pembangunan<br>Lintas Sektor di<br>Kampung KB                                                                                    | 1            | 1            | 3.750.000            | 3.750.000            | 3.750.000          | 100,<br>00        |
| 2.14<br>.03.<br>2.04<br>.000<br>5 | Fasilitas Pengelolaan Dapur<br>Sehat Atasi Stunting<br>(DASHAT) di Kampung<br>Keluarga Berkualitas                                                                                             | Jumlah DASHAT<br>di Kampung KB                                                                                                                                        |              |              | 840.000.000          | 840.000.000          | -                  | 0,00              |



|                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |               |               |                      |                      |                      |                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2.14<br>.03.<br>2.04<br>.000<br>6 | Pelaksanaan dan<br>Pengelolaan Program<br>Bangga Kencana di<br>kampung Keluarga<br>Berkualitas                                                                                                 | Jumlah Kampung<br>KB yang Mengikuti<br>Pelaksanaan dan<br>Pengelolaan<br>Program Bangga<br>Kencana<br>(Pembangunan<br>Keluarga,<br>Kependudukan, dan<br>Keluarga<br>Berencana) di<br>Kampung KB | 28            | 28            | 546.000.000          | 546.000.000          | 475.999.300          | 87,1<br>8         |
| 2.14<br>.04                       | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN DAN<br/>PENINGKATAN<br/>KELUARGA<br/>SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                            | <b>Persentase<br/>keterlaksanaan<br/>pemberdayaan<br/>dan peningkatan<br/>Keluarga<br/>Sejahtera (KS)</b>                                                                                       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>2.446.060.200</b> | <b>2.235.440.200</b> | <b>1.435.105.700</b> | <b>64,2<br/>0</b> |
| 2.14<br>.04.<br>2.01              | <b>Pelaksanaan<br/>Pembangunan Keluarga<br/>MelaluiPembinaan<br/>Ketahanan dan<br/>Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                                  | <b>Persentase<br/>capaian keluarga<br/>yang<br/>mendapatkan<br/>pembinaan<br/>ketahanan dan<br/>kesejahteraan<br/>keluarga</b>                                                                  | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>1.211.260.200</b> | <b>1.000.640.200</b> | <b>268.144.500</b>   | <b>26,8<br/>0</b> |
| 2.14<br>.04.<br>2.01<br>.001<br>7 | Promosi dan Sosialisasi<br>Kelompok Kegiatan<br>Ketahanan dan<br>Kesejahteraan Keluarga<br>(BKB, BKR, BKL, PPPKS,<br>PIK-R dan Usaha<br>Peningkatan Pendapatan<br>Keluarga Akseptor<br>(UPPKA) | Jumlah orang yang<br>megikuti Kegiatan<br>Ketahanan dan<br>Kesejahteraan<br>Keluarga (BKB,<br>BKR, BKL,<br>PPPKS, PIK-R dan<br>Pemberdayaan<br>Ekonomi<br>Keluarga/UPPKS)                       | 10            | 10            | 616.189.300          | 405.569.300          | 9.424.500            | 2,32              |
| 2.14<br>.04.<br>2.01<br>.001<br>8 | Pengadaan Sarana<br>Kelompok Kegiatan<br>Ketahanan dan<br>Kesejahteraan Keluarga<br>(BKB, BKR, BKL, PPPKS,<br>PIK-R dan Usaha<br>Peningkatan Pendapatan<br>Keluarga Akseptor<br>(UPPKA)        | Jumlah Unit Sarana<br>Kelompok Kegiatan<br>Ketahanan dan<br>Kesejahteraan<br>Keluarga (BKB,<br>BKR, BKL,<br>PPPKS, PIK-R dan<br>Pemberdayaan<br>Ekonomi<br>Keluarga/UPPKS)                      | 28            | 28            | 595.070.900          | 595.070.900          | 258.720.000          | 43,4<br>8         |



|                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |  |  |                    |                    |               |            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|---------------|------------|
| 2.14<br>.04.<br>2.02              | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                         |  |  | 1.234.800.000      | 1.234.800.000      | 1.166.961.200 | 94,5<br>1  |
| 2.14<br>.04.<br>2.02<br>.000<br>5 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting ( Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/Balita)                           | Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) |  |  | 588.000.000        | 588.000.000        | 520.161.200   | 88,4<br>6  |
| 2.14<br>.04.<br>2.01<br>.000<br>6 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting ( Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/Balita)                                            | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,Bad uta/Balita) yang mendapat pendampingan     |  |  | 646.800.000        | 646.800.000        | 646.800.000   | 100,<br>00 |
| Jumlah Total                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |  |  | 11.484.192.40<br>6 | 10.431.778.08<br>1 | 7.048.354.778 | 67,5<br>7  |

Jika dilihat dari akuntabilitas keuangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 yang lalu dialokasikan dana belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung dengan target belanja total sebesar Rp. 10.431.778.081 dan dapat direalisasikan /dibelanjakan sebesar 7.048.354.778 atau 67,57% dari total belanja yang dialokasikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



## BAB IV PENUTUP

### Kesimpulan

Dari penyusunan dokumen serta verifikasi data-data yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB yang diukur dari indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra SKPD maupun dalam dokumen RPJMD, serta jika dilihat dari alokasi anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana setelah menjalankan program dan kegiatan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

#### 1. NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH

Pada indikator ini capaian kinerjanya adalah sebesar 58,42.7%. Target belum mencapai 100% dikarenakan Aspek Perencanaan masih dalam proses perbaikan, dalam hal ini perbaikan dokumen RENSTRA. Maka hal yang perlu dilakukan kedepan yaitu memperbaiki indikator target dan capaian dalam perubahan RENSTRA.

#### 2. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Pada indikator ini capaian sudah melebihi target, dikarenakan target yang dicanangkan terlalu rendah sedangkan sudah terdapat banyak lapangan pekerjaan bagi perempuan. Maka hal yang perlu dilakukan kedepan yaitu meningkatkan target indikator pada perubahan RENSTRA.

#### 3. Rasio KDRT

Pada indikator ini belum mencapai target di karenakan karena kurangnya sosialisasi tentang UU KDRT dan banyak kasus kekerasan terhadap perempuan setelah dilaporkan oleh korban kemudian di cabut lagi karena faktor kekeluargaan. Maka hal yang perlu dilakukan kedepan yaitu meningkatkan sosialisasi tentang UU KDRT dan edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, lewat media KIE (online, brosur, pamflet, radio, spanduk, dll).



#### 4. PREDIKAT KABUPATEN LAYAK ANAK

Pada indikator ini belum mencapai target di karenakan banyak data lintas sektor (OPD) yang belum terregistrasi dan belum sesuai dengan indikator yang dibutuhkan serta sdm yang masih kurang dalam konvensi hak anak. Maka hal yang perlu dilakukan kedepan yaitu melakukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan haka nak dan tersertifikasi, serta melakukan pembentukan-pembentukan Lembaga-lembaga yang ramah anak ( desa ramah anak, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, ruang bermain ramah anak, taman bermain anak, dll)

#### 5. Total angka kelahiran (TFR)

Pada indikator ini capaiannya telah melebihi target, dikarenakan sudah banyak Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi di kabupaten Halmahera utara. Maka hal yang perlu dilakukan kedepan yaitu mempertahankan jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi, dengan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP).

Demikian lkj-ip ini dibuat sebagai tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara, dalam menjalankan program dan kegiatan dan disampaikan kepada instansi terkait dan juga sebagai laporan kepada masyarakat agar dapat diketahui sejauh mana capaian yang didapat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 yang lalu.

Tobelo, 18 Maret 2025

Kepala DP3AKB  
Kabupaten Halmahera Utara

  
**IDHAM NOH, S.Ag**

Pembina IV/a

Nip. 197707062005011016